

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini Sistem teknologi informasi dibutuhkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari kehidupan, pada dunia perkantoran teknologi informasi dibutuhkan untuk menyajikan laporan kegiatan, laporan keuangan maupun perencanaan perusahaan. Sistem teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan terutama untuk laporan keuangan perusahaan ataupun instansi pemerintahan, pada instansi pemerintah saat ini laporan keuangan disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari analisis transaksi, pencatatan (jurnal), pemosting, pembuatan buku besar, pembuatan neraca saldo, penyesuaian, hingga pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 5 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan mengharuskan pembuat laporan keuangan harus memiliki kapabilitas dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu untuk mengurangi kesalahan yang ditimbulkan akibat kurang teliti dan ketidakmampuan seseorang dalam menyusun laporan keuangan. Tersedia nya sistem informasi berbasis digital berupa aplikasi atau software akan memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Resiko salah input data, kesalahan penjumlahan, kesalahan klasifikasi akun bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi tersebut agar informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan valid. Informasi yang valid membuat pengambilan keputusan menjadi tidak bias (Ribeiro, Prativiera, 2014).

Laporan keuangan sektor pemerintahan digunakan untuk menyajikan pertanggung jawaban anggaran yang sudah diberikan yang digunakan untuk pelayanan publik instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Indikator

berjalan lancar dan sukses atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari penyerapan anggarannya dan efektif atau tidaknya anggaran yang diberikan dan dimanfaatkan untuk pelayanan publik, dalam penyusunan anggaran pemanfaatan aplikasi atau software juga digunakan dalam sektor pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Sebuah sistem juga diperlukan di sektor pemerintahan, karena instansi harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dalam rangka pelayanan kepada publik (Jorge, Eirado, 2011). Peranan aplikasi atau software di sektor pemerintahan juga sama pentingnya dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi pemerintahan diharuskan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan instansi saat ini adalah aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal).

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara dituliskan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sebagai bentuk keberlanjutan usaha kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. SAP Berbasis Akruwal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akruwal. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP berbasis Akruwal sesuai dengan PP no 71 Tahun 2010.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward

accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA). Mengingat sejak 2005 sampai 2014 aplikasi SAI telah digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Laporan Keuangannya, sehingga dapat dikatakan semua satuan kerja telah familiar dengan aplikasi tersebut. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi ini. Aplikasi SAIBA dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual berupa LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Karena Aplikasi dikembangkan dari Aplikasi SAIBA maka polanya pengembangannya dimulai dari perekaman dokumen baik secara manual maupun secara elektronik dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut dilakukan posting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Dokumen sumber yang digunakan dalam SAIBA sebagian besar sama dengan dokumen akuntansi yang selama ini digunakan seperti: DIPA Petikan Satker, Revisi DIPA, SPM/SP2D, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja, dan Memo Jurnal penyesuaian.

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP 71/2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual berupa:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

- 2) Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 4) Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dan per tanggal tertentu;
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang. Akuntansi akrual mengakui beban ketika suatu transaksi terjadi, dianggap menyediakan gambaran operasional pemerintah secara lebih transparan. Namun demikian, penerapannya memiliki banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang panjang, bahkan dapat melebihi periode masa jabatan kepala daerah atau kepala pemerintahan lainnya.

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen.

Atas dasar uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pemanfaatan Dan Efektivitas Aplikasi Saiba (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Puslitbang Humaniora Dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan aplikasi SAIBA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyusunan laporan keuangan?
2. Apakah Efektivitas aplikasi SAIBA efektif sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyusunan laporan keuangan?
3. Kendala-kendala dalam penerapan Aplikasi SAIBA saat ini?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa pemanfaatan kesesuaian Aplikasi SAIBA dengan Standar Aplikasi Pemerintah pada penyusunan laporan keuangan.
2. Mengetahui dan menganalisa efektivitas Aplikasi SAIBA pada penyusunan laporan keuangan.
3. Mengetahui dan menganalisa kendala dalam penerapan Aplikasi SAIBA pada penyusunan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai Pemanfaatan maupun Efektivitas Aplikasi SAIBA pada penyusunan laporan keuangan.
2. Bagi Regulator, Penelitian ini bermanfaat bagi Pejabat Pengelola bagian keuangan untuk dapat mengevaluasi sistem Informasi yang sesuai dengan SAP dan efektivitas dalam penggunaannya.
3. Bagi Kantor Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Penelitian ini memberikan mafaat kepada Kantor Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan karena dapat membantu mengevaluasi pemanfaatan dan efektivitas Aplikasi SAIBA pada penyusunan laporan keuangan sehingga Pimpinan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat pada penyusunan anggaran di masa depan.